



Penyerahan KUR Kluster UMKM

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) disaksikan Menkeu Sri Mulyani (kiri) saat acara penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kluster kepada pelaku UMKM di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022). Presiden Joko Widodo menyalurkan KUR kluster kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan plafon hingga Rp 500 juta per pelaku usaha.

Antara

Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Disalurkan untuk Masyarakat Terdampak

JAKARTA, ID – Pemerintah melakukan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk dua tahun ke depan. Penetapan kebijakan penyesuaian tarif CHT tersebut telah mempertimbangkan aspek ekonomi, ketenagakerjaan, keberlanjutan industri rokok, dan upaya pengendalian peredaran rokok ilegal.

Oleh Arnoldus Kristianus

Penerimaan negara yang berasal dari penyesuaian tarif ini akan disalurkan kembali untuk masyarakat terdampak dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai (DBH) CHT. Nilai penyaluran DBH CHT ini akan naik dari 2% menjadi 3% dan akan digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal.

“Melalui Dana Bagi Hasil CHT, kami terus meningkatkan dukungan terhadap para petani dan buruh serta buruh tembakau maupun buruh rokok. Kalau kita lihat 2022 dan 2023 dibandingkan *policy* mengenai DBH CHT 2020 dan 2021, terlihat sekali keberpihakan dari kebijakan DBH ini,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pernyataan resmi yang diterima, Senin (19/12/2022).

Tarif cukai dan batasan minimum Harga Jual Eceran (HJE) yang baru mulai berlaku sejak 1 Januari 2023 dengan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan. Komitmen tersebut juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana pemerintah menetapkan target penurunan prevalensi merokok khususnya usia 10-18 tahun sebesar 8,7% pada 2024.

Besaran alokasi DBH CHT akan diberikan sebanyak 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pekerja industri tembakau yang terdampak. “Untuk bidang kesehatan, DBH CHT dialokasikan sebesar 40% dan DBH CHT untuk bidang penegakan



Melalui Dana Bagi Hasil CHT, kami terus meningkatkan dukungan terhadap para petani dan buruh serta buruh tembakau maupun buruh rokok. Kalau kita lihat 2022 dan 2023 dibandingkan *policy* mengenai DBH CHT 2020 dan 2021, terlihat sekali keberpihakan dari kebijakan DBH ini.

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan

hukum sebesar 10%,” terang dia. Selanjutnya, dari sisi implementasi dan pengawasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan melakukan langkah-langkah guna memastikan kelancaran proses transisi dari kebijakan tahun sebelumnya menuju tahun 2023. Langkah pertama, yaitu, mulai tanggal 15 Desember 2022, DJBC akan melakukan penetapan kembali terhadap seluruh merek sigaret yang masih berlaku yang terdaftar pada administrasi DJBC. Pelaksanaan penetapan kembali dilakukan terotomasi melalui ap-

Reformasi Kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Tarif
<ul style="list-style-type: none"> Menaikkan tarif cukai secara regular setiap tahun dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan Tarif cukai naik sebesar 23% (2020), 12,5% (2021), dan 12% (2022)
Alokasi dan Dana Bagi Hasil CHT
<ul style="list-style-type: none"> Di 2022 alokasi DBH CHT sebesar 2% penerimaan cukai hasil tembakau, serta ditujukan untuk kesehatan (40%), kesejahteraan masyarakat (50%), dan penegakan hukum (10%). Alokasi untuk tahun 2023 naik menjadi 3% (Rp 6,5 triliun)
Penegakan Hukum
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penindakan terhadap rokok ilegal. Tingkat rokok ilegal turun dari 12,1% pada 2016 menjadi 5,5% tahun 2022.
Harga
<ul style="list-style-type: none"> Mengatur batasan minimum Harga Jual Eceran (HJE) Memonitor Harga Transaksi Pasar (HTP) Menggunakan tools kebijakan untuk mengestimasi dampak kebijakan cukai pada harga rokok, konsumsi, dan penerimaan.

Sumber: Kemenkeu

likasi ExSis tanpa permohonan dari pengusaha pabrik atau importir.

Sementara, untuk pengusaha pabrik/importir rokok elektrik dan HPTL mulai 15 Desember 2022 perlu untuk mengajukan permohonan penetapan tarif cukai merek baru karena adanya perubahan administrasi cukai. Terkait pemesanan pita cukai, proses Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Tahun Anggaran 2023 sudah dapat dilakukan melalui aplikasi ExSis oleh pengusaha pabrik/importir sesuai setelah proses penetapan kembali berhasil dilakukan.

Terkait ketersediaan pita cukai, DJBC telah berkoordinasi dengan konsorsium penyedia pita cukai untuk menilai kesiapan konsorsium dalam mencetak pita cukai Tahun Anggaran 2023. Dari koordinasi tersebut, pihak konsorsium menjamin ketersediaan pita cukai Tahun Anggaran 2023 pada awal Januari 2023. Untuk menunjang kelancaran masa transisi ini, DJBC akan melakukan sosialisasi

kebijakan kepada asosiasi pelaku usaha industri hasil tembakau.

Dengan adanya penyesuaian tarif ini, diperkirakan ada potensi bertambahnya rokok ilegal. Untuk itu, upaya pengawasan dan penindakan akan terus ditingkatkan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Pada 2022, lebih dari 37 ribu penindakan terhadap rokok ilegal berhasil dilakukan. Angka ini meningkat hampir 28% dari penindakan tahun 2021. Keberhasilan penindakan tersebut merupakan buah dari strategi pengawasan yang terdiri atas kolaborasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga dalam rangka pengawasan dari hulu ke hilir, kolaborasi internal DJBC mulai dari unit pengawasan, unit pelayanan, unit kehumasan, dan unit kepatuhan internal. Kebijakan cukai hasil tembakau yang mengkomodifikasi kepentingan banyak pihak, sehingga kolaborasi dengan para pihak terkait merupakan prasyarat keberhasilan perumusan dan pelaksanaan kebijakannya.

Program KUR Kluster Tingkatkan Peluang UMKM Naik Kelas

JAKARTA, ID – Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kluster memberikan beragam manfaat pendampingan bagi para pelaku UMKM, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi. KUR Kluster memberikan peluang pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp 500 juta per unit usaha.

“KUR Kluster juga memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar, menempatkan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok industri sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha, meningkatkan kualitas produksi, dan meningkatkan kapasitas UMKM jadi naik kelas,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Penyerahan KUR Kluster dan Penyaluran Dana melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), Senin (19/12/2022).

Menurut Teten, pelaksanaan program KUR Kluster menjadi sangat penting bagi Indonesia khususnya untuk meningkatkan kemitraan usaha besar dengan usaha kecil. Saat ini, UMKM yang terhubung ke rantai pasok industri di Indonesia baru 7% sedangkan yang terhubung ke rantai pasok



Teten Masduki

global 4%. “Vietnam sudah 26%, sehingga sangat relevan kita memperluas KUR Kluster agar meningkatkan kemitraan usaha besar dan usaha kecil,” tandas Teten. KUR Kluster biasanya ditujukan untuk kelompok usaha yang melibatkan mitra usaha melalui perkebunan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya. Sejauh ini, KUR Kluster sudah diterapkan di sektor pertanian dan kali ini akan diterapkan ke pelaku UMKM di sektor lainnya. UMKM yang terhubung perdagangan elektronik juga bisa memanfaatkan KUR Kluster.

“Ini bisa menjadi solusi bagi usaha mikro dan kecil yang terkendala masalah agunan pinjaman. Di sisi lain, kami juga terus mendorong pelaku UMKM

untuk memanfaatkan aplikasi digital dalam pencatatan keuangan mereka,” kata dia.

Menteri Teten menambahkan, pihaknya juga telah membuat *piloting* KUR Kluster berbasis koperasi dengan menyiergikan KUR dengan dana bergulir LPDB untuk koperasi. Peran koperasi sebagai agregator dan *off taker*, dengan dukungan pembiayaan berbunga 6% lebih meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil. “Selain bisa mengkonsolidasi usaha-usaha mikro guna mencapai skala ekonomi, menggantikan para tengkulak atau memotong rantai perdagangan juga menjamin suplai yang lebih baik ke pasar,” tandas Teten.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, model-model KUR Kluster perlu diperluas dengan masuk ke sektor peternakan, kelautan, hingga sektor-sektor mikro lain. Dia juga meminta agar pihak perbankan ikut berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM. Pemerintah sudah menargetkan porsi kredit UMKM dapat mencapai 30% pada 2024. “Karena kalau kita urus, itu yang kecil-kecil bisa jadi menengah, yang menengah kita urus bisa jadi *gede*. Inilah yang akan mendorong ekonomi kita tumbuh dengan baik dan berkeadilan,” kata Joko Widodo. (ark)

Opsi Prefunding Diperlukan untuk Pembiayaan APBN 2023

JAKARTA, ID – Pemerintah masih perlu melakukan *prefunding* untuk pembiayaan APBN 2023. Langkah ini perlu diambil, mengingat tersisa dua pekan menjelang akhir tahun 2022.

Adapun *prefunding* merupakan strategi pembiayaan APBN dengan penerbitan SBN dalam jumlah besar sebelum tahun anggaran dimulai. “Kalau melihat dari kondisi APBN tahun ini memang untuk *prefunding* saya kira masih dibutuhkan untuk tahun depan, hanya saja jumlahnya masih akan menyesuaikan dengan kas APBN hingga akhir tahun,” jelas ekonom Core Yusuf Rendy Manilet kepada *Investor Daily*, Senin (19/12/2022).

Lebih lanjut, terkait seberapa besar kebutuhan pembiayaan awal tahun 2023, jika melihat dari sisi kondisi belanja negara saat ini masih ada peluang sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pada awal tahun. Meski demikian, ia tidak bisa memproyeksi besaran silpa pada akhir tahun, mengingat perhitungan APBN masih terus berjalan hingga akhir tahun ini. “Artinya, *prefunding* nanti disesuaikan dengan jumlah surat utang yang dibutuhkan pemerintah,” kata dia.

Menurut Yusuf, tantangan pasar keuangan meningkat seiring langkah agresif The Fed menyebabkan tren suku bunga acuan relatif masih tinggi. Dengan demikian, *cost of*



Yusuf R Manilet

fund dari surat utang termasuk di dalamnya surat utang pemerintah akan relatif tinggi. “Ini kemudian perlu menjadi perhatian khusus pemerintah dalam penerap- an ataupun menjalankan strategi *prefunding* tersebut,” tegas dia.

Namun demikian jika melihat dari kondisi ekonomi global, sebenarnya kondisi saat ini relatif lebih stabil kondisi terutama kondisi pasar keuangan. Apalagi data terbaru inflasi di Amerika Serikat (AS) pada November lalu mulai melandai. “Kita

melihat adanya tren inflasi yang relatif melandai di AS, sehingga menandakan bahwa kebijakan dari dekat dalam menaikkan suku bunga acuan cukup agresif dalam beberapa bulan terakhir itu secara bertahap mulai terlihat dampaknya salah satunya dengan inflasi yang kenaikannya mulai melandai,” kata dia.

Respons kenaikan suku bunga The Fed, dinilai Yusuf, juga tidak seagresif dibandingkan bulan-bulan sebelumnya meskipun mengalami kenaikan tetapi masih *loosing*. “Saya pikir ini juga bisa dibaca oleh pemerintah, bahwa ada peluang kondisi pasar keuangan setengah stabil dan juga bisa menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan seberapa besar dalam menerbitkan surat utang di awal tahun,” jelas dia.

Adapun pagu penarikan utang tahun depan mencapai Rp 696,31 triliun, dengan rincian SBN neto Rp 712,93 triliun, dan pinjaman neto minus Rp 16,62 triliun. (try)

PENGUMUMAN TENTANG PENURUNAN MODAL

PT. TOPAZ INDONESIA, Berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan), bermaksud untuk melakukan Penurunan modal Dasar Perseroan dan menarik kembali sebagian modal dasar perseroan.

Penurunan Modal tersebut dilaksanakan sesuai dengan persetujuan dari pemegang saham Perseroan, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Para Kreditur Perseroan dapat mengajukan keberatan tertulis sehubungan dengan penurunan modal perseroan disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung ke alamat Perseroan Gd. Plaza Asia, Lt.3C, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah pengumuman ini diterbitkan.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UUPT.

Jakarta, 19 Desember 2022
Direksi
PT. TOPAZ INDONESIA

CIMBNIAGA

PEMBERITAHUAN

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020

No	PARAMETER	JUMLAH	
		SERI B	SERI C
1	Portofolio Pembiayaan dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)		28.674.200.000.000
2	Pendapatan Pembiayaan dari Akad MMQ		168.286.000.000
3	Nilai Sukuk Mudharabah	287.000.000.000	391.000.000.000
4	Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah	17,50%	18,13%
5	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk Mudharabah + Insentif	5.022.500.000	7.086.875.000
6	Tingkat Bagi Hasil Setara (p.a)	7,00%	7,25%

Sehubungan dengan hal tersebut, pembayaran pendapatan bagi hasil ke-11 Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 27 Desember 2022.

Jakarta, 20 Desember 2022

EMITEN

CIMBNIAGA
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

WALI AMANAT

PermatamBank
PT BANK PERMATA Tbk

ADB Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 Jadi 4,8%

JAKARTA, ID – Asian Development Bank (ADB) memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan menjadi 4,8% secara *year on year* (yoy). Proyeksi ini menurun dibandingkan laporan ADB September lalu di kisaran 5% (yoy).

“Pada 2023, pertumbuhan akan tertahan oleh melambatnya ekspor barang seiring dengan melemahnya ekonomi negara maju,” ungkap ADB dalam laporan terbaru *Asian Development Outlook Supplement* edisi

Desember, Senin (19/12/2022).

Sementara itu, untuk konsumsi swasta diproyeksi kembali ke tren pertumbuhan. Namun, pengetatan kebijakan fiskal untuk mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap PDB dan pengetatan moneter berupa kenaikan suku bunga acuan, turut menekan prospek pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun depan.

Lebih lanjut, untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun ini diproyeksi

mencapai 5% (yoy). Capaian ini disokong oleh kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 yang tercatat tumbuh 5,7% (yoy). “Sejauh ini pada 2022, konsumsi swasta terus tumbuh di atas tingkat tren sebelum pandemi, dan investasi meningkat sehingga mengimbangi penurunan belanja publik. Sedangkan ledakan ekspor berlanjut karena permintaan yang kuat untuk komoditas primer. Ekspor jasa juga tumbuh pesat seiring pulihnya kedatangan wisatawan,” demikian laporan ADB.

Sedangkan laju inflasi di Indonesia diproyeksikan menjadi rata-rata 4,2% pada 2022, lebih rendah dari laporan sebelumnya. Namun, laju inflasi di atas target bank sentral sebesar 2-4%. Untuk alasan yang sama *output* di bawah potensi penuh, pasokan yang cukup menahan harga pangan, ekspektasi inflasi yang stabil, dan bank sentral telah memulai babak *preemptive* kenaikan suku bunga kebijakan, proyeksi inflasi untuk 2023 dire-

visi turun sedikit menjadi 5,0%.

Adapun ADB bukan satu-satunya lembaga internasional yang merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023. Sebelumnya, Fitch mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8% (yoy) dari proyeksi semula 5,8% (yoy). Kemudian, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 hanya 4,8% (yoy), melandai dari perkiraan pertumbuhan 2022 sebesar 5,2% (yoy). (try)